



Hindari Korupsi Dana Desa

■ Muda Perkuat Pembayaran Non Tunai

KUBU RAYA, TRIBUN - Kejaksaaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat memberikan Penyuluhan dan Penerangan Hukum diwilayah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada Kamis (25/3). Dalam hal ini, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengaku bersyukur akan keterlibatan Kejaksaaan terkait pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa.

Kata Muda, walau selama ini Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menjalankan Cash Management System (CMS) atau pengelolaan keuangan dana desa secara non tunai. Namun, upaya bersama harus tetap terus dilakukan, apalagi dalam memberikan pemahaman Kepada setiap kepala Daerah.

"Kami mengapresiasi dan bersyukur. Kenapa? Kita juga tidak ingin terlena. Walaupun kita sudah berusaha dengan pengelolaan dana desa melalui sistem CMS. Tapi sinergitas bersama dengan Kejaksaaan dan Polres

Agar ada kesamaan paham untuk mempercepat pencegahan-pencegahan itu

Muda Mahendrawan
Bupati Kubu Raya

juga harus dilakukan, agar ada kesamaan paham untuk mempercepat pencegahan-pencegahan itu," ungkap Muda Mahendrawan.

Ia menyampaikan, penguatan terhadap sistem yang dijalankan inipun terus dilakukan. Sehingga mengurangi peluang-peluang akan terjadinya penyelewengan.

"Mudah-mudahan kita bisa, nantinya kedepan kita terus melakukan penguatan terhadap sistem ini juga. Agar celah-celah itu bisa dimaksimalkan. Supaya peluang-peluang untuk melakukan itu bisa dibentengi. Agar tidak terlanjut salah, dan lalai," sampainya.

Kepala Desa Parit Baru Musa Abdul Hamid menilai bahwa dengan penerapan Cash Management System (CMS) yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, sebagai perlindungan setiap kepala desa dalam mengelola keuangan dana desa.

"Salah satu tembok pagar yang dibuat oleh Bupati untuk melindungi uang masyarakat, terlebih setiap kepala desa dalam pengelolaan dana desa, salah satunya dengan sistem CMS ini," ungkap Musa seusai menghadiri Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum.

Ia mengatan bahwa, sistem yang telah dijalankan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ini betul-betul sangat membantu dalam msnghindari peluang terjadinya kekeliruan pengelolaan dana desa. "Namun, seperti yang telah dibuat ini, sekokoh apapun pasti ada kekurangannya. Nah tapi bagaimana kekurangan ini bisa ditutupi, dengan dibentengi oleh kepala desa itu sendiri. Karena kalau kepala desa sudah ada niat, sistem apapun pasti bobol," katanya.

Selama menerapkan sistem CMS inipula, kata Musa pengelolaan dana desa lebih mudah, terlebih transparan dan akuntabel. Sehingga, tidak terjadinya penyelewengan keuangan desa pun dapat diminimalisir. Sebab dapat dilihat dari rekening koran.

"Penerapannya saya pikir lebih Lebih mudah, transparan dan akuntabel daripada yang tunai. Karena kita tidak melibatkan diri dalam memegang uang secara langsung," sampainya. **(muz)**



IST

PENYULUHAN - Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum, dalam Penyuluhan dan Penerangan Hukum oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, di Aula Kantor Bupati Kubu Raya pada Kamis (25/3).